

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN DI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
RADIATUL ASRINA
NIM: 105190061**

**Pembimbing:
Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI
H. M. Mustajab, Lc., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KESLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, MEI 2023



RADIATUL ASRINA
NIM : 105190061



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 07 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.







Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: <u>Wenny Destina, M.SI</u> NIP. 19780109005012006	()
Sekretaris Sidang	: <u>Awaluddin, S.Ag</u> NIP. 196911202003121002	()
Penguji I	: <u>Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI</u> NIP. 197407182000032002	()
Penguji II	: <u>Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP</u> NIP. 197107062007102001	()
Pembimbing I	: <u>Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI. M.HI</u> NIP. 198201102005012004	()
Pembimbing II	: <u>H. M. Mustajab, Lc., M.H</u> NIP. 199109142020121011	()

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nissa (4); 58).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin.....

Segala puji bagi Allah SWT untuk segala rahmat dan juga rizqi berupa kesempatan dan segala hal yang dia berikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi saya dengan kelebihan beserta kekurangannya. Kemudian Shalawat serta salam kepada junjungan saya kekasih nya Allah SWT Nabi Muhammad SAW yang dengan segala usaha Rasullullah SAW saya bisa menikmati dunia penuh dengan ilmu seperti sekarang.

Dengan rasa bangga serta rendah hati saya persembahkan hasil karya tulis ini kepada kedua Orang tua saya tersayang Asis (Ayah) dan Ratna (Ibu) yang selalu memberikanku kasih dan sayang, ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta do'a terbaiknya kepadaku, dan dukungan materinya, sehingga aku bisa menyelesaikan studiku. Kalian sangat berarti bagiku saudara-saudara ku yang sangat mendukung ku dalam menyelesaikan kuliah ku Syahril Ramadhan dan Fadli Ardiansyah

Serta terimakasih banyak bagi sahabat yang telah membantu saya dan memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan kuliah saya ini Bayu Septian dan Rts. Sahrani Dini.

Dan terakhir tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan saya, Untuk lokal IP B 2019 dan teman-teman yang lain tidak bisa kusebutkan satu persatu, serta seluruh keluarga dan rekan-rekan yang dalam hal ini ikut berperan dalam penyelesaian studi saya dalam mencapai gelar S.IP Kuucapkan banyak terimakasih kepada kalian semua, hanya seberkas kertas ini yang dapatku persembahkan kepada kalian. Semoga Allah SWT selalu mempermudah segala urusan kehidupan kalian dan membalas kebaikan kalian kepadaku dikemudian hari.

Aamin Yaa Rabbal 'Alamin.....

ABSTRAK

Nama : Radiatul Asrina

NIM : 105190061

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman dan kendala-kendala yang di hadapi pemerintah dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa: Sebagai peran dan tanggung jawabnya, pemerintah sebagai aktor pembangunan mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan program PPSP dilaksanakan diberbagai Kabupaten, Kabupaten tanjung Jabung Timur salah satunya karena mengingat Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten yang berkembang pesat yang sedang giat melakukan pembangunan dan tidak lepas dari dampak yaitu sanitasi. Sanitasi kurang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini belum berjalan dengan maksimal dilihat dari bidang persampahan, bidang air limbah dan bidang drainase, walaupun pemerintah sudah melakukan upaya kampanye, edukasi, dan Advokasi.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, PPSP, Sanitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Name : Radiatul Asrina

NIM : 105190061

Title :The Effectiveness of the Implementation of the Accelerated Sanitation Development Program for Settlements in East Tanjung Jabung Regency, Jambi Province

Abstract: This thesis aims to find out how the implementation of the accelerated housing sanitation development program is implemented and the obstacles faced by the government in implementing the accelerated housing sanitation development program in East Tanjung Jabung Regency, Jambi Province. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used consisted of observation, interviews, and documentation. Based on the data collection techniques above, the researcher evaluates and concludes that: As a role and responsibility, the government as a development actor issues development policies or programs to achieve development goals. The implementation of the PPSP program is carried out in various districts, one of which is East Tanjung Jabung Regency, considering that East Tanjung Jabung Regency is a rapidly growing district that is actively carrying out development and cannot be separated from the impact, namely sanitation. Sanitation is getting less attention from the government. The implementation of the Settlement Sanitation Development Acceleration program in East Tanjung Jabung Regency has not run optimally in terms of the solid waste, waste water and drainage sectors, even though the government has made campaign, education and advocacy efforts.

Keywords: P ublic Policy, PPSP, Sanitation

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu sehingga dapat diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Merupakan suatu kajian tentang penerapan pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi emukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

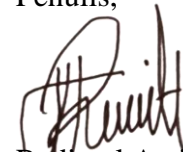
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.ThI, MA., M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan II di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI dan bapak H. M. Mustajab, Lc., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen danseluruh karyawan/karyawati fakultas syariah. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, 2023

Penulis,



Radiatul Asrina
NIM 105190061

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Teori Efektivitas.....	15
B. Program.....	19
C. Percepatan Pembangunan.....	22
D. Sanitasi	25
E. Permukiman	27
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B. Kecamatan Muara Sabak Timur.....	33
C. Profil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	40

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi	53
B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.....	66
C. Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Letak Desa/Kelurahan Menurut Geografis di Kecamatan Muara Sabak Timur	33
Tabel 2 : Jumlah Penduduk dan Persentasenya di Kecamatan Muara Sabak Timur Berdasarkan Kelurahan/Desa Tahun 2022.....	35
Tabel 3 : Kemajuan Pelaksanaan SKK Untuk Persampahan	57
Tabel 4 : Kemajuan Pelasanaan SKK Untuk Air Limbah Domestik	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	33
Gambar 2 : Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	44
Gambar 3 : Sistem Sanitasi Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ..	55
Gambar 4 : Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	61

DAFTAR SINGKATAN

PPSP	: Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
MDGS	: Millenium Development Goals
UU	: Undang-Undang
DENSUS	: Detasemen Khusus
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
PERDA	: Peraturan Daerah
SDA	: Sumber Daya Alam
IPLC	: Izin Pembuangan limbah Cair
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
SLBM	: Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
TPS	: Tempat Pembuangan Sampah
POKJA	: Kelompok Kerja
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
PERKIM	: Perumahan dan Permukiman
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
PAMSIMAS	: Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPST	: Tempat Pembuangan Sampah Akhir
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
IPLT	: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
SPAL	: Saluran Pembuangan Air Limbah
CSR	: Corporate Social Responsibility
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya pembuangan limbah cair dan sampah domestik untuk menjamin lingkungan hidup yang bersih dan sehat di rumah dan lingkungan tempat tinggal. Sanitasi dibagi menjadi 3 (tiga) sub bidang, yaitu: (a) Air Limbah, (b) Persampahan, (c) Drainase Tersier.¹ Sanitasi merupakan suatu upaya pencegahan atas penularan dan terjangkitnya penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah.

Secara umum sanitasi mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit diseluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain itu sanitasi juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah. Kebersihan sangat penting untuk menjaga kehidupan masyarakat, dan setiap aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kebersihan yang baik. Namun tidak semua masyarakat mampu menyediakan dan mengelola fasilitas sanitasinya dengan

¹ Edi Setiadi Soedjono, dkk., *Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi*, (Jakarta: Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010), hlm. 2.

baik, menurut BAPPENAS, Indonesia baru mencapai 17,14% fasilitas sanitasi dasar dan 67,02% fasilitas sanitasi pada tahun 2017.²

Sanitasi belum menjadi prioritas utama, dampak sanitasi buruk semakin meluas diantaranya degradasi lingkungan hingga kerugian perekonomian, sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis masyarakat. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung timur difokuskan kepada penataan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan dapat dicegahnya terkontaminasi air tanah dari air limbah hasil kegiatan manusia khususnya dilingkungan pemukiman yang padat penduduk dan atau kawasan kumuh serta peningkatan kualitas, kuantitas dan kontunuyitas penyediaan air minum bagi masyarakat.

Setiap orang membutuhkan sarana dan prasarana sanitasi sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah berbagai penyakit seperti diare, ISPA, dan lain-lain. Salah satu upaya pencegahannya adalah dengan meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan yang sehat secara keseluruhan dengan meningkatkan sanitasi lingkungan tempat tinggal mereka, baik dari segi kondisi di masyarakat, dengan meningkatkan kesadaran akan perubahan, mereka dapat memperoleh fasilitas sanitasi yang layak. Program Percepatan

² “Bappenas Optimalkan DAK Dana Desa,” <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kejar-target-100-persen-akses-air-minum-dan-sanitasi-layak-di-2019-bappenas-optimalkan-dak-dana-desa/>, diakses pada Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembangunan Sanitasi Pemukiman ini dilaksanakan melalui upaya pengelolaan kesehatan yang lebih terencana, terukur, terpadu dan sistematis. Indonesia saat ini melakukan pencegahan penyakit terkait lingkungan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan akses sanitasi yang layak dengan mengajak masyarakat khususnya di daerah terpencil untuk membangun sarana dan prasarana guna menunjang berbagai kegiatan mereka, salah satunya yaitu, perilaku higienis dicapai dengan tidak melakukan kegiatan buang air besar sembarangan. Buang air besar sembarangan terjadi karena masyarakat tidak memiliki akses sanitasi berupa jamban, jamban permanen atau jamban sederhana. Karena itu, banyak warga yang buang air besar sembarangan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.³

Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) bertujuan untuk memprioritaskan percepatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi subsektor yaitu: air limbah domestik, limbah domestik dan drainase lingkungan.⁴ Rencana tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih terintegrasi terhadap strategi kesehatan perkotaan yang diadopsi oleh pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung yang mendukung percepatan pembangunan kesehatan

³ Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

⁴ Pokja (ed.), *Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, (2013), hlm. 13.

melalui advokasi, perencanaan strategis dan implementasi terpadu yang komprehensif.

Target Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman antara lain mengurangi jumlah masyarakat yang buang air besar sembarangan, mengelola sistem pengelolaan air limbah dan mengurangi penggunaan air limbah secara sembarangan, meningkatkan efektivitas pelayanan pengelolaan sampah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah. Sistem 3R (pengurangan), penggunaan kembali dan daur ulang) ukuran rumah tangga, ketersediaan masterplan sampah, peningkatan sarana dan prasarana sampah, peningkatan cakupan PROHISAN.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perumahan (PPSP) yang direncanakan pemerintah bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Selain itu, merupakan komitmen bersama semua pihak yang terlibat dalam investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang sanitasi. Melalui PPSP ini diharapkan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, donor, dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam pembangunan sanitasi. Selain itu, PPSP dilakukan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).⁵

⁵ “Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman,” <https://baper.litbang.kendalkab.go.id/program-percepatan-pembangunan-sanitasi-permukiman-ppsp/>, diakses pada 3 November 2012.

Maka dari itu penulis tertarik ingin mengangkat judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis mengadakan pembatasan ruang lingkup untuk lebih mengenal objek yang akan diteliti mengingat luasnya permasalahan yang akan diteliti dan keterbatasan waktu yang dimiliki penulis, dengan maksud agar masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula dan tetap relevan dengan judulnya.

Batasan masalah dalam penulisan ini tentang bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun peneliti membatasi tahun 2017-2021 dan Kecamatan Muara Sabak Timur.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan diatas adapun tujuan penelitian penulis:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaa Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dan melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan. Selain itu diharapkan juga bisa menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengambil objek yang berbeda.

b. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat untuk mengembangkan kemampuan untuk menganalisis permasalahan dilapangan tentang Pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman di Kabupaten Tanjung Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Sebagai sumbangsih pengetahuan kepada mahasiswa yang meneliti tentang pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman di Kabupaten Tanjung Timur.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi stakeholder yang berkaitan langsung maupun tidak langsung khusus mengenai analisis pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman di Kabupaten Tanjung Timur.
- 4) Sebagai bahan untuk memenuhi syarat dan penjelasan tingkatan ilmu pendidikan guna memperoleh gelar strata satu (S1) jurusan ilmu pemerintahan di universitas islam negeri sultan thaha Saifuddin jambi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang terkait dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, adalah seperti penelitian berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muttofi'ah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020 dengan judul **“Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi Desa Sei Toman, Kec. Mendahara Ulu).⁶** Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa program tersebut telah berhasil dilaksanakan, karena dengan adanya program ini masyarakat setempat khususnya desa sei toman telah amat sangat terbantu dalam hal kebutuhan air, Namun tidak menutup

⁶ Muttofi'ah, *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi Desa Sei Toman, Kec. Mendahara Ulu)*”, Skripsi Universitas IslamNegeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemungkinan bahwasanya dari program PAMSIMAS ini masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni menyangkut dari kualitas serta kuantitas airnya sendiri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh David Silaen mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018 dengan judul “**Evaluasi Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di Kabupaten Sukoharjo**”. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa komunikasi antara pelaksana program dengan pemerintah pusat/provinsi dan masyarakat maupun di antara sesama pelaksana program telah terjalin dengan baik. Selain pemerintah dan masyarakat, pihak swasta dan organisasi non-pemerintah juga ikut mendukung pelaksanaan program. Kondisi sosial dan politik yang kondusif di Kabupaten Sukoharjo turut mendukung pelaksanaan program PPSP di Kabupaten Sukoharjo. Pada beberapa kasus, terjadi penolakan oleh masyarakat dikarenakan sosialisasi yang kurang menyeluruh. Kekurangan sumber daya serta kondisi ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ikut menghambat pelaksanaan program.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Diyan Mailita Sari mahasiswi Universitas Indonesia, 2015 dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) di Kota Depok**”. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan program PPSP di Kota Depok baru sampai tahap perencanaan dan belum berjalan maksimal karena masih ada berbagai kendala yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang,

⁷ David Silaen, “*Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Sukoharjo*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keterbatasan anggaran dana, dan kemampuan aparatur pemerintah yang masih kurang.⁸

Berbeda dengan peneliti sebelumnya walaupun sama-sama meneliti tentang sanitasi namun berbeda fokus penelitian yang penelitian sebelumnya membahas efektivitas program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, selanjutnya fokus pada komunikasi antara pelaksana program dengan pemerintah pusat/provinsi dan masyarakat maupun di antara sesama pelaksana program, dan selanjutnya berfokus pada pelaksanaan program PPSP di Kota Depok baru sampai tahap perencanaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman dibidang persampahan, bidang air limbah dan bidang drainase.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan temuan dilapangan. Metode ini memaparkansituasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari dan menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi.⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi, yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas

⁸ Diyan mailita Sari, “Analisis Pelaksanaan Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) di Kota Depok”, Skripsi Universitas Indonesia, (2015).

⁹ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada 2009), hlm 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penelitian memakai dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. di bawah ini akan dirincikan satu persatu apa saja yang termasuk kedalam data primer dan data sekunder serta untuk menunjang penelitian ini agar terealisasi.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Ataupun yang dianggap pula menggunakan sumber data yaitu yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁰

2) Data Sekunder

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diterima peneliti tidak langsung dari itemnya tetapi dari berbagai sumber, termasuk sumber lisan dan tertulis.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau perantara. Karena informasi ini dikumpulkan dengan mengutip sumber tambahan kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak dapat dianggap otentik.¹¹

¹⁰ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta: 2011), hlm. 42.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Palembang: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020) hlm. 48.

b. Sumber Data

Asal atau sumber data, yang mungkin berupa buku perpustakaan atau individu yang sebenarnya, yaitu informasi atau responden, digunakan sebagai dasar informasi atau subjek. Pemilihan sumber data berdasarkan jenis data yang sudah diketahui, seperti sumber data berdasarkan dokumen, pustaka, dan sumber lapangan. Sumber data penelitian dimodifikasi agar sesuai dengan penekanan dan tujuannya. Tanggapan dari wawancara informan lapangan penulis, atau data yang dikumpulkan selama penelitian, adalah sumber data dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan utama penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi adalah proses rumit yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Kemampuan untuk mengamati dan mengingat adalah dua yang paling signifikan. Diharapkan dengan menggunakan teknik ini, peneliti akan memperoleh informasi mengenai lokasi penelitian. Pada kenyataannya, pengamatan fenomena yang diteliti dalam arti luas tidak hanya terbatas pada yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Maka penulis mengamati secara langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Wawancara

Wawancara adalah prosedur tanya jawab yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi secara lisan dari dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mengumpulkan informasi untuk wawancara pihak terkait, digunakan pendekatan wawancara.

Salah satu pendekatan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah metode wawancara kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua premis utama. Pertama, dengan mewawancarai peneliti, kita dapat menemukan tidak hanya apa yang akan diketahui dan dialami oleh subjek penelitian, tetapi juga apa yang terkubur dalam topik itu. Kedua, pertanyaan tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan yang terhubung lintas waktu dapat ditanyakan kepada informan.¹² Teknis yang paling esensial adalah dengan mewawancarai pihak yang terkait seperti Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA, Kepala Bidang Pengelola Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) DLH, Staff Sanitasi Dinas Perumah dan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini sebagai pelengkap dari teknis wawancara, observasi, dokumentasi yang dimaksudkan mengambil

¹² Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Alfabeta, 2007), hlm. 65.

sumber data, baik dari pengelolaan pokja kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahan ilmiah yang berkaitan dengan pokja, buku-buku yang berkaitan dengan PPSP, hasil keputusan masa lampau mengambil informasi dari internet, serta foto-foto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dengan menggunakan model kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Tiga metode analisis data kualitatif, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dijelaskan oleh Miles dan Huberman.¹³ Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data tidak selalu mengikuti pengumpulan data, dan analisis data tidak selalu dilakukan setelah pengolahan data. Analisis data melibatkan pemadatan data ke dalam format yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Data tersebut kemudian secara bersamaan diperiksa dengan prosedur pengumpulan data proses analisis ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Informasi yang diperoleh dari wawancara kemudian direkam dan dijadikan catatan lapangan. Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana peneliti memilih dan mengatur data yang bersangkutan untuk disajikan. Pengurangan bahan wawancara yang direkam dan kemudian ditranskrip dilakukan dengan maksud untuk mempermudah peneliti dalam memilih data yang tepat untuk diteliti.

¹³ Matthew Miles, dkk., *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hlm.16

Pengurangan data, khususnya data yang dikumpulkan, merupakan informasi penting untuk analisis.

b. Penyajian Data

Data disajikan dengan meringkas data yang ada secara lugas, komprehensif, integratif yang berfungsi sebagai landasan untuk memilih langkah selanjutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan di kemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya.

Selama proses studi, kesimpulan terus-menerus dicapai. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan memperoleh makna dari data yang dikumpulkan baik sebelum dan selama proses pengumpulan data. Secara khusus, peneliti mencari pola, tema, hubungan, dan kejadian umum lainnya yang diuraikan dalam kesimpulan sementara tetapi dengan jumlah yang terus bertambah. Verifikasi data yang berkelanjutan akan menghasilkan kesimpulan yang beralasan (dasar). Kesimpulan ini merupakan data yang mengenai dengan data yang bersangkutan dengan Analisis Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di Kabupaten Tanjung Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk menciptakan ketetapan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tuntutan kehidupan masing-masing. Menurut Siagian, memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Efektivitas bila dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah (pelaksana pembangunan), maka efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih bertuju pada pengeluaran (output) bila dibandingkan dengan penggunaan masukan (input). Saxena menjelaskan efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) yang telah dicapai. Semakin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas.¹⁴

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas

¹⁴ Indrawijaya dan Adam Ibrahim, *Konsep Prilaku, dan Budaya Organisasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 175

pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.¹⁵

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih memilih tujuandengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal. Pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, Pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶

Oleh sebab itu yang dimaksud dengan efektivitas dalam pembangunan tentunya ditujukan kepada ketetapan penggunaan seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka komponen-komponen atau unsur-unsur efektivitas pembangunan yaitu:¹⁷

1) Ketepatan penggunaan anggaran

Ketepatan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan kepada program pembangunan yang

¹⁵ Gary Jonathan Mingkid, dkk., “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No. 2 (Tahun 2017), hlm. 3

¹⁶ Yudhi Lestanata, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga,” Vol. 3, No. 3 (tahun 2016), hlm. 373

¹⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), hlm. 141

telah ditentukan sebelumnya. Dengan ketepatan penggunaan anggaran inilah yang dimaksudkan dengan efektivitas anggaran dalam pembangunan.

2) Ketepatan penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan, namun manusia juga merupakan unsur utama dalam kegagalan pelaksanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh anggota masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kebijakan agar manusia sebagai pelaksana pembangunan dan merupakan peggungan dari hasil-hasil pembangunan dapat memberikan ketepatan.

3) Ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan

Kelengkapan peralatan dan perlengkapan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, maka itulah kebijakan yang mengatur tentang ketetapan penggunaan peralatan dan perlengkapan sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan hidupnya.

4) Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia

5) Ketepatan penggunaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam memang sangat terbatas tetapi penggunaannya senantiasa tidak terbatas bagi manusia, olehnya itu dibutuhkan suatu aturan

atau kebijakan yang mengatur tentang ketepatan pemanfaatan sumber daya alam.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut pendapat Krech bahwa ukuran efektivitas itu sendiri yaitu:¹⁸

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program, atau kegiatan.
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan antara kondisi yang kondusif (ranah/field) dalam dunia di mana peran itu difungsionalkan, yang dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka ukuran efektivitas adalah suatu standar terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

¹⁸ M. Alie Humaedi, dkk., *Etnografi Bencana Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta:PT LkiS Printing Cemerlang, 2016), hlm. 43

Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan program yang akan di teliti, yaitu peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut.

B. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.¹⁹

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran.²⁰

Menurut Jones program diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan agar dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai. Dan menurut Hans Hochholzer program merupakan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan tujuan dan

¹⁹ Muhaimin, dkk., Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 349.

²⁰ Mudasir, "Desain Pembelajaran", Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Indragiri Hulu (2012), hlm. 1.

sarana yang ditetapkan. Suatu program yang disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai pedoman kerja.

Sedangkan menurut Charles O. Jones program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai perogram atau tidak yaitu:

- 1) Program cenderung membutuhkan staff, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai selaku program.
- 2) Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- 3) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa didalam setiap program dijelaskan mengenai:

- 1) Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- 2) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- 3) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- 4) Perkiraan anggran yang dibutuhkan.
- 5) Strategi pelaksanaan.²¹

Adapun tindakan yang harus di ambil dalam program kerja sebagai berikut:

²¹ Alexander Anggono, "Akuntansi Manajemen Pada Entensitas Publik", (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hlm. 102

1) Sarana dan Prasarana

Kondisi dan kemampuan semua sarana dan prasarana yang ada, tujuannya untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak operasi atau tidak, bila masih layak operasi, maka apa saja perbaikan dan penyempurnaan harus dilakukan, untuk menjalankan program 1 tahun.

2) Metode

Semua metode yang digunakan dan proses yang dijalankan untuk menjalankan program kegiatannya.

3) Kemampuan Sumber Daya Manusia

Untuk mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap metode dan proses kerja oleh pimpinan organisasi untuk memenuhi sampai dimana kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaannya.

4) Semangat Kerja

Seorang pemimpin harus mengetahui kondisi pengurus dan sifat bawahan mereka, sehingga seorang pemimpin mampu memberi semangat kerja pada pengurus tentang kebijakan dan sistem imbalan yang mencakup nilai intensif dan penilaian prestasi kerja.

Ada tiga alasan pokok mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi yaitu:

1) Efisiensi Organisasi

Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi, maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

apa saja yang akan di buat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat.

2) Efektivitas Organisasi

Keefektifan organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.

3) Target Organisasi

Sebuah program kerja disusun oleh salah satunya karen dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencapai target ataupun tujuan dari sebuah organisasi. Dan program kerja merupakan sarana ataupun anak tangga untuk mencapai target ataupun puncak dari tujuan sebuah organisasi.

D. Percepatan Pembangunan

Percepatan merupakan usaha untuk membuat sesuatu bergerak lebih cepat, percepatan dalam pembangunan adalah proses upaya, tindakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu untuk mempercepat kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan bertujuan memberikan perubahan perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah proses untuk melakukan perubahan atau suatu proses perubahan yang disengaja untuk mencapai perbaikan kehidupan

dan penghidupan yang berkesinambungan. Menurut siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut korten pembangunan adalah proses dengan anggota-anggota suatu masyarakatnya meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya dalam upaya kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.²²

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik secara material maupun spiritual. Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari definisi ini dapat muncul tujuh ide pokok, yaitu²³:

- 1) Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disuatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang tanpa akhir (never ending).
- 2) Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.

²² Sitti Faizah, “Identifikasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2020), hlm. 41-42.

²³ Siagin, *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2009), hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- 4) Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang dan perubahan mengandung makna suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu ke jangka waktu lain.
- 5) Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas ini dapat diartikan diantara lain sebagai cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- 6) Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional.
- 7) Usaha pembinaan bangsa.

Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan usaha tidak hanya mempercepat proses pembangunan disuatu daerah namun juga untuk membangun masyarakat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Pembangunan masyarakat adalah setiap usaha-usaha perbaikan atau kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat setempat guna mencapai kondisi masyarakatnya setingkat lebih baik daripada kondisi yang mendahuluinya.

Percepatan pembangunan diarahkan pada pengembangan kegiatan-kegiatan sektor riil dan sektor ekonomi unggulan dengan mengacu pada satuan wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengembangan. Percepatan pembangunan juga perlu didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana percepatan pembangunan takkan tercapai tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.²⁴

Percepatan pembangunan dilakukan agar suatu lokasi dapat dioptimalkan sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi. Percepatan pembangunan khususnya pada percepatan pembangunan infrastruktur merupakan usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya pada pemenuhan prasarana dasar yang dapat menunjang aktivitas masyarakat.

E. Sanitasi

Sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber. Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan.²⁵ Sanitasi menurut World Health Organization adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sanitasi juga dapat didefinisikan sebagai usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Secara luas, ilmu sanitasi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu

²⁴ Samugyo Ibnu Raedjo, “Strategi dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah”, Skripsi Universitas Komputer Indonesia, (2021), hlm. 86.

²⁵ Zulhamida Putri Harahap, “Gambaran Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Penyakit Skabies Pada Penghuni Lapas Klas IIB”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, (2021), hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memperbaiki, mempertahankan, atau mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia.²⁶

Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Dengan kata lain sanitasi merupakan upaya yang dilakukan demi menjamin dan mewujudkan kondisi yang sudah memenuhi syarat kesehatan.

Menurut Rocket sanitasi merupakan usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi sehingga merugikan pertumbuhan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.²⁷ Sedangkan menurut Mubarak sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia.²⁸

Jadi dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.

Pelayanan sanitasi adalah salah satu bentuk pelayanan dasar yang wajib didapatkan oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan peran pemerintah daerah untuk mengetahui capaian layanan sanitasi dan menentukan target layanan

²⁶ Andi Sriwahyuni, “*Hubungan Sanitasi Lingkungan Rumah Dan Personal Hygiene*”, Skripsi Universitas HasanuddinMakassar, (2019), hlm. 24

²⁷ Dahlan Abdullah, Perancangan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Pada Kantor Bupati, *Jurnal Teknik Informatika*, (Tahun 2019), hlm. 2

²⁸ Nur Samsu Hadi, “*Hubungan Antara Higiene Sanitasi Dengan Keberadaan Angka Kuman*”, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun, (2019), hlm. 11-12.

sanitasi layak dan aman, maka diperlukan penyusunan dokumen perancangan pembangunan sanitasi.²⁹

Sanitasi tempat-tempat umum adalah usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha-usaha kebersihan atau kesehatan tempat-tempat umum dalam melayani masyarakat umum sehubungan dengan aktivitas tempat-tempat umum tersebut secara fisiologis, psikologis, mencegah terjadinya penularan penyakit atau kecelakaan serta estetika, antar penghuni, pengguna, dan masyarakat sekitarnya.³⁰

Sanitasi atau kesehatan lingkungan sangatlah penting untuk tetap menjaga kesehatan suatu lingkungan dalam upaya mencegah terjadinya masalah gangguan kesehatan akibat faktor lingkungan yang dapat berpotensi merugikan kesehatan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh individu-individu, masyarakat, atau negara untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya masalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan hidup eksternal manusia disebut sanitasi lingkungan.³¹

F. Permukiman

Pemukiman dan Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan memiliki fungsi yang sangat banyak. Menurut Rio De Jeniere mengartikan pembangunan pemukiman secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan

²⁹ Muhammad Debby Rizani, dkk., “Perdampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (Tahun 2022), hlm. 72

³⁰ Gede Agus Depantara, dkk., “Tinjauan Keadaan Fasilitas Sanitasi obyek Wisata Pura Tirta Sumadala Kelurahan Bebalang”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, vol.9 No. 1 (Tahun 2019), hlm. 73-74

³¹ Supriadi, “Penerapan Hiygiene Dan Sanitasi Di Pondok Pesantren As’ad Seberang Kota Jambi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 18 No. 1 (Tahun 2018), hlm. 132.

untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman merumuskan bahwa Pemukiman adalah Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.³²

Permukiman adalah lingkungan hunian yang meliputi manusia dan alam sekitarnya untuk menunjang kelangsungan hidup sehari-hari. Dimana permukiman dapat memiliki ciri khas tersendiri karena interaksi manusianya. Sedangkan permukiman yang tidak memiliki izin dikategorikan sebagai permukiman liar, walaupun memiliki kualitas permukiman yang buruk pula. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor yang penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera. Lingkungan pemukiman merupakan salah satu diantaranya yang selalu berinteraksi dengan manusia.³³

Menurut Kasjono permukiman adalah suatu struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, juga lingkungan dari struktur tersebut termasuk semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani dan keadaan sosialnya yang baik untuk keluarga dan individu. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di

³² Siti Fuadillah, “Upaya Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Privat Pada Kawasan Pemukiman Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, (2013), hlm. 56

³³ Normawati Kristin Situmorang, “Sanitasi Dasar Pemukiman Pesisir Di Lingkungan”, Skripsi Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, (2021), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.³⁴ Perumahan dan pemukiman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah.

Permukiman sehat adalah suatu tempat untuk tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi dan sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan. Permasalahan permukiman merupakan permasalahan yang terus muncul, salah satunya adalah permukiman kumuh. Kawasan kumuh sering dijumpai di kota-kota besar di dunia. Secara umum, kawasan kumuh merupakan suatu kawasan dengan tingkat kepadatan populasi yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Lingkungan atau kawasan permukiman kumuh tidak selalu berada di pinggiran kota, namun juga berada di dekat pusat kota. Kehidupan masyarakat yang hidup di lingkungan permukiman kumuh umumnya tidak tersentuh oleh Dari unsur permukiman ini kita dapat mengetahui terdapat lima unsur pembentuk permukiman yakni; manusia, alam, masyarakat, perlindungan (bangunan), dan jaringan. Dari kelima unsur tersebut penelitian ini lebih terpusat pada unsur manusia dan perlindungan, bagaimana hubungan antar kedua unsur tersebut. Dari kajian teori juga didapatkan faktor pembentuk tingkat permukiman kumuh adalah kualitas lingkungan, kualitas bangunan, dan kepadatan bangunan.

³⁴ Amsal, *Masalah Permukiman Perkotaan Di Indonesia Dan Kebijakan Penanggulangannya*, (Jakarta: Indocam, 2018), hlm. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam penentuan lokasi atau suatu pemukiman, perlu adanya suatu kriteria atau persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai lokasi pemukiman.

Kriteria tersebut antara lain:

- 1) Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.
- 2) Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam.
- 3) Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni.
- 4) Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0-15 %, sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan atau drainase yang baik serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun perumahan.
- 5) Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Adapun beberapa jenis prasarana lingkungan yang harus tersedia di lingkungan pemukiman yaitu:

- 1) Prasarana Jaringan jalan

Jalan merupakan prasarana yang digunakan untuk mempermudah mobilitas antara masyarakat satu dengan yang lain dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.

³⁵ Kartika Puspa Dewi, dkk., “Penentuan Kualitas Pemukiman Berdasarkan Kriteria Eco-Settlement”, *Jurnal Spasial Vol. 6 No. 1* (Tahun 2019), hlm. 170.

2) Prasarana Jaringan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan vital manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi dan kebutuhan akan konsumsi air minum. Air yang dibutuhkan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari manusia dengan menggunakan air yang bersih untuk rasa nyaman dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

3) Prasarana Jaringan Drainase

Jaringan drainase merupakan prasarana yang digunakan untuk mengalirkan air yang ada di permukaan tanah. Dari jaringan drainase ini dialirkan dari permukaan tanah menuju penerima air atau peresapan buatan.

4) Prasarana Pengelolaan Sampah

Aktivitas manusia dalam beraktivitas sehari-hari menghasilkan berbagai macam sampah, sampah dari aktivitas adalah bekas dan yang dibuang oleh rumah tangga tersebut. Sampah perlu dikelola agar tidak menimbulkan kotor disuatu lingkungan.

5) Prasarana Jaringan Air Limbah

Air limbah ialah limbah cair yang berasal dari air buangan atau air bekas. Air limbah yang biasanya dari pemukiman ialah airlimbah dari kebiasaan sehari-hari seperti kebiasaan buang air kecil dan besar, mandi serta kebutuhan manusia akan memasak harus tersedia di lingkungan pemukiman.³⁶

³⁶ Agung Pri Aji, “Kajian Karakteristik Pemukiman”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Puwokerto, (2018), hlm. 8-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pusat pemerintahan berada di Muara Sabak Barat merupakan salah satu kabupaten baru dari 9 kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk sebagai daerah pemekaran baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung, yang terbagi menjadi dua yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada $0^{\circ}53'$ – $1^{\circ}41'$ LS dan $103^{\circ}23'$ – $104^{\circ}31'$ BT dengan luas 5.445 Km^2 dengan ketinggian ibukota-ibukota kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl.³⁷

Gambar 1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur



³⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, *Profil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Tahun 2022

B. KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR

1. letak Geografis Kecamatan Muara Sabak Timur

Wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur, sebelah utara berbatasan dengan Laut China Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Rantau Rasau, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dendang dan Kecamatan Rantau Rasau, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Barat.

Secara geografis luas Kecamatan Muara Sabak Timur 7,53 % dari luas kabupaten Tanjung Jabung Timur dan luas wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur 239,6 km², terdiri dari 10 desa dengan luas wilayahnya yaitu: Muara Sabak ilir 42,90 km², Muara Sabak Ulu 24,00 km², Kota Raja 19,20 km², Siau Dalam 14,00 km², Lambur I 13,30 km², Lambur II 24,00 km², Simbur Naik 33,75 km², Kuala simbur 39,85 km², Lambur 8,40 km², Kota Harapan 5,70 km², Alang – Alang 14,50 km², Sungai Ular 12,40 km².³⁸

Tabel 1

Letak Desa/Kelurahan Menurut Geografis di Kecamatan Muara Sabak Timur

NO	Desa/Kelurahan	Kondisi Geografis
1	Muara Sabak Ilir	Bukan Pesisir
2	Muara Sabak Ulu	Bukan Pesisir
3	Kota Raja	Bukan Pesisir
4	Siau Dalam	Bukan Pesisir

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, *Kecamatan Muara Sabak Timur Dalam Angka*, Tahun 2022.

5	Lambur I	Bukan Pesisir
6	Lambur II	Bukan Pesisir
7	Simbur Naik	Pesisir
8	Kuala Simbur	Pesisir
9	Lambur	Pesisir
10	Kota Harapan	Pesisir
11	Alang-Alang	Pesisir
12	Sungai Ular	Pesisir

2. Aspek Demografis Kecamatan Muara Sabak Timur

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Muara Sabak Timur tahun 2021, laki-laki sebanyak 16.510 orang dan perempuan sebanyak 16.133 orang. Jumlah penduduk Kecamatan Muara Sabak Timur tahun 2022 sebanyak 32.643 jiwa. Dibawah ini tabel jumlah penduduk di Kecamatan Muara Sabak Timur tahun 2022.

Tabel 2

Jumlah Penduduk dan Persentasenya di Kecamatan Muara Sabak Timur Berdasarkan Kelurahan/Desa Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (orang)	Persentase (%)
1.	Muara Sabak Ilir	3613	11,07
2.	Muara Sabak Ulu	3685	11,29
3.	Kota Raja	1681	5,15
4.	Siau Dalam	2550	7,81

5.	Lambur I	3264	10,00
6.	Lambur II	4548	13,93
7.	Simbur Naik	3931	12,04
8.	Kuala Simbur	1053	3,23
9.	Lambur	4707	14,42
10.	Kota Harapan	1793	5,49
11.	Alang-alang	1329	4,07
12.	Sungai Ular	489	1,50
	Jumlah Total	32.643	100,00

3. Keadaan Ekonomi Kecamatan Muara Sabak Timur

Perekonomian yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wilayah Muara Sabak Timur cukup berpotensi karena wilayah Muara Sabak Timur cukup strategis dan lahan yang baik untuk pertanian, perkebunan, kelautan, peternakan maupun pertambangan yang ada di kecamatan Muara Sabak Timur untuk mendukung kemajuan daerah Kecamatan Muara Sabak Timur. Potensi-potensi yang dapat dijelaskan oleh penulis adalah:

a. Pertanian

Pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di area Muara Sabak Timur yang sering ada di masyarakat ialah jenis palawija, padi, jagung dan tanaman lainnya. Untuk tanaman pangan padi sawah, tanaman yang hidup dikawasan pasang surut membuat tanaman ini cocok untuk iklim dan keadaan tanah daerah itu sendiri. Jika saat cuaca dimusim kemarau atau musim kering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

petani banyak menggunakan musim ini untuk menanam tanaman yang hidup di daerah kering seperti: semangka, jagung, kedelai dan tanaman palawija lainnya.

Meskipun sektor pertanian telah mencapai hasil yang cukup menggembirakan, namun masih mungkin untuk ditingkatkan lagi, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi. Peningkatan melalui intensifikasi diantaranya dilaksanakan dengan penggunaan alat-alat pertanian modern, pada tahun 2021 telah disediakan/ didistribukan alsintan alat tanam jagung sebanyak 36 unit, hand sprayer elektrik sebanyak 20 unit, traktor roda empat sebanyak 20 unit, hand sprayer elektrik sebanyak 171 unit, pompa air sebanyak 147 unit, rice transplanter sebanyak 24 unit, combine harvester sebanyak 6 unit, cultivator sebanyak 14 unit dan mesin pemotong rumput sebanyak 58 unit.

b. Perkebunan

Pada wilayah wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya area Muara Sabak Timur tanaman yang sangat potensial dan dapat dikembangkan ialah kelapa, pinang, karet, kopi, kelapa sawit dan buah-buahan tahunan seperti duku dan durian. Pada tahun 2021 luas tanaman pinang mencapai 9.242 hektar, dengan produksi sebesar 16.136 ton, selanjutnya luas tanaman kelapa mencapai 58.912 hektar dengan produksi sebesar 57.259 ton, luas tanaman kopi liberika adalah 3.451 hektar dengan produksi 1.237 ton, luas area tanaman lada hanya 39 hektar dengan jumlah produksi 9 ton. Produktivitas hasil panen masih rendah disebabkan oleh tanaman masih berusia muda, bibit campuran/asalan serta kurangnya pemupukan dan pemeliharaan. Perkembangan luas tanam dan produktivitas selama periode tahun.

c. Peternakan

Jenis ternak yang sering dipelihara oleh penduduk yang berada di daerah Muara Sabak Timur ini berupa unggas, kambing, kerbau, domba dan sapi. Jenis unggas yang dipelihara adalah ayam buras, ayam pedaging dan itik. Untuk hasil ternak ada yang menghasilkan daging atau dijual secara bibit.

d. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya daerah Muara Sabak Timur mempunyai potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar. Dengan panjang garis pantai 230,90 Km yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan perbatasan Provinsi Sumatera Selatan, mempunyai potensi perikanan tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar. Hasil perikanan tangkap pada Tahun 2020 mencapai 26.834,44 ton, dan perikanan budidaya kolam dan bioflak sebesar 522,06 ton. Untuk lebih meningkatkan produksi perikanan sekaligus untuk menanggulangi kemiskinan pada kelompok nelayan, pada Tahun 2020 telah diberikan bantuan pada kelompok Nelayan dan kelompok Pembudidaya, berupa bantuan pakan ikan sebanyak 1 paket, bantuan benih patin/nila sebanyak 2 paket, bantuan benih lele sebanyak 1 paket, bantuan alat tangkap belat sebanyak 10 paket, bantuan gill net 488 Piece. selain bantuan peralatan tangkap juga dialokasi bantuan untuk pengolahan hasil tangkapan berupa bantuan alat Pengering Ikan Asin sebanyak 2 paket, bantuan Kemasan Ikan Asin dan Kemasan Terasi sebanyak 1 paket.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e. Migas dan Pertambangan

Kondisi morfologis dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadikan daerah ini kaya akan bahan tambang. Bahan tambang yang dimiliki antara lain: minyak dan gas bumi, bahan tambang dan galian seperti andesit, pasir pantai, pasir sungai, pasir kuarsa, tanah liat dan granit putih.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kandungan minyak bumi dan gas yang cukup besar. Pada saat ini ada dua perusahaan asing, yaitu PETRONAS dari Malaysia dan PETROCHINA dari China., yang melakukan eksplorasi gas dan minyak bumi di wilayah ini. Petronas masih tahap eksplorasi dilepas pantai, sedangkan Petrochina sudah eksploitasi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki cadangan minyak bumi 250 juta barrel sedangkan gas alam cair potensinya 2 Milyard Feet Cubis Gas sebagai potensi sumberdaya non hayati. Untuk periode tahun lifting minyak bumi Petrochina Jabung Ltd. Mencapai 712.637 Bbls. Sedangkan lifting gas alam Petrochina Jabung Ltd. Pada periode yang sama mencapai 6.754,42 ribu MMBTU.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dibidang Industri Ekstaktif Migas, tentu akan lebih menjamin kapasitas usaha disektor migas, lingkungan sekitar wilayah eksplorasi dan eksploitasi serta tenaga kerjanya.

f. Bahan Tambang dan Galian

Jumlah cadangan tereka andesit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Muara Sabak 3 Barat (Kelurahan Parit Culum I dan

Desa Rano) mencapai 320.460.000 m. Bahan galian andesit dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk olahan, seperti batu ornamen, batu dinding, batu ukiran maupun batu rata. Pada saat ini bahan andesit sudah ditambang oleh penduduk sebagai bahan bangunan atau konstruksi (pengerasan jalan).

Bahan galian pasir pantai terletak di bagian timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu di sepanjang pantai barat Desa Remau Bakutuo Kecamatan Sadu. Volume cadangan pasir sungai 3 tereka hasil perhitungan dengan peta topografi skala 1:50.000 adalah sekitar 51.750.000 m.

Jumlah volume cadangan pasir sungai tereka yang tersebar di sepanjang tepi Sungai 3 Berbak, Kecamatan Berbak adalah sekitar 11.695.200 m. Secara umum pasir sungai kurang prospek untuk ditambang dengan model tambang skala besar, karena kendala geologi erosi sungai dan keterbatasan cadangan yang dimiliki.

Jumlah volume cadangan tereka kaolin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar 629.500 m³, yang terdapat di Kecamatan Mendahara Ulu (Kelurahan Simpang Tuan). Dalam industri, kaolin dapat berfungsi sebagai pelapis (coater), pengisi (filter), bahan-bahan tahan api dan isolator.

Penggunaan kaolin yang utama adalah dalam industri-industri kertas, keramik, cat, sabun, karet/ban dan pestisida dan masih banyak lagi untuk bahan industri yang lain. Jumlah volume cadangan tereka tanah liat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar 365.916.000 m. Cadangan ini tersebar di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak, Kelurahan Bandarjaya dan Desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau, Desa Kota Baru Kecamatan Geragai.

Tanah liat dimanfaatkan untuk membuat batu bata, genteng ataupun keramik. Tanah liat juga dapat digunakan untuk bahan baku semen portland.

g. Parawisata

Nilai sosial budaya yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal merupakan aset pembangunan yang tidak terperikan nilainya. Sedang atraksi budaya dan objek wisata merupakan modal dasar untuk pengembangan perekonomian kerakyatan dimasa mendatang. Setelah pertanian, industri, dan keuangan, maka pariwisata merupakan sektor unggulan yang harus terus dikembangkan.

C. PROFIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah. Kepala badan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas membantu Bupati membuat, mengoordinasikan, dan menyusun rencana, program, dan anggaran serta mengevaluasi dan menyusun laporan pemerintah daerah.³⁹ Sarana dan prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai

³⁹ Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

institusi perencana harus mampu bekerja dengan maksimal karena otonomi daerah menuntut kesiapan dan kemampuan untuk mengelola daerah semaksimal mungkin sehingga menjadi tantangan kedepan adalah penyiapan sumberdaya yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, sehingga mampu menjawab tantangan yang ada dan merubahnya menjadi sebuah peluang.

Dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan BAPPEDA menyangkut tugas dan fungsi yang dijalankan tentunya harus dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan permasalahan yang ada di dalam kewenangan BAPPEDA dan lingkungan eksternal merupakan permasalahan yang dapat dilihat dari sudut luar institusi BAPPEDA. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah antara lain:

- a) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
- b) belum optimalnya memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- c) belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan.
- d) belum meratanya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia perencana.
- e) masih adanya pemberdayaan antara data sektoral dan data BPS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- f) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat.
- g) belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah diterapkan.
- h) sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegritas dengan sistem monitoring dan evaluasi.

Adapun visi dari Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Periode 2021-2026 adalah: **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)”**

Dari visi diatas, kemudian dijabarkan dalam Empat misi yaitu:

- a) Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan.
- b) Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing
- c) meningkatkan investasi daerah yang kompetitif dan lestari
- d) Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Bappeda terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Bappeda berkontribusi langsung dalam mendukung pencapai misi ke 4 yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis.

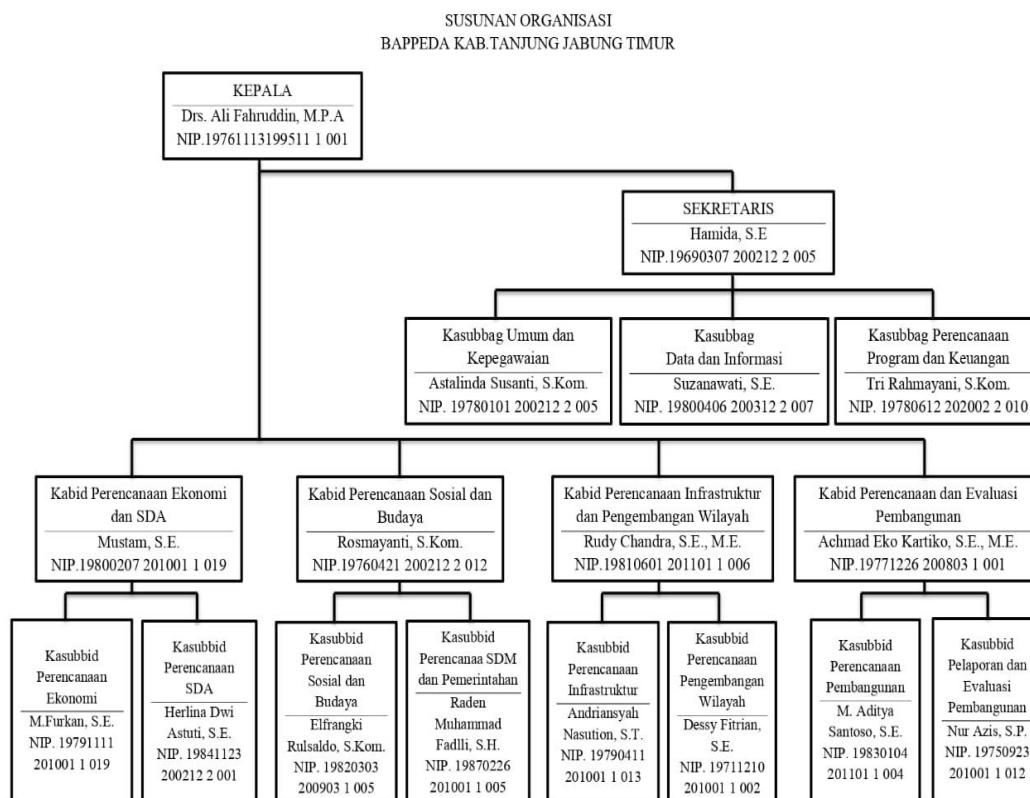
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur

Gambar 2

Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah



Tugas dan tanggung jawab kelompok dan subkoordinator Bappeda

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Membantu Bupati dalam membina, mengatur, dan membuat rencana, program, dan anggaran serta penilaian dan pembuatan laporan penyelenggara pemerintah daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun kebijakan teknis, strategi, dan program perencanaan pembangunan daerah.
- b) Mengkoordinasikan dan mengelola informasi tentang perencanaan dan anggaran pemerintah daerah.
- c) Menyusun rencana pembangunan yang terdiri dari rencana pembangunan daerah jangka panjang, rencana pembangunan daerah jangka menengah, dan rencana kerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d) Pembuatan program keuangan, catatan, atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pembuatan pagu anggaran sementara, prioritas, dan kebijakan umum anggaran.
- e) Melaksanakan pemantauan, menilai program dan strategi, serta membuat laporan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f) Implementasi penyediaan sarana perencanaan teknis oleh pemerintah daerah.
- g) Melaksanakan organisasi perencanaan pembangunan daerah secara administratif.
- h) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawab dan wewenagngnya.

1. Sekretariat**Sekretariat mengkoordinasikan bidang:**

- 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1.2 Sub Bagian Data dan Informasi
- 1.3 Sub Bagian Perencanaan Program dan keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas merancang, menyusun rencana, strategi, dan anggaran di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi bertanggung jawab mengumpulkan informasi, mencari, menganalisis, dan menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang perdagangan, industri, dan pariwisata.

Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan pembangunan. Badan ini juga mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana, program dan anggaran untuk urusan lingkungan, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan energi.

Adapun fungsi Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dimaksud dalam pasal 623 Perbub 31 tahun 2016 yaitu:

- a) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- b) Pelaksanaan rencana strategis aparatur daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- c) Mengkoordinasi penerapan RPJPD ekonomi dan sumber daya alam, RPJMND dan RKPD.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergi dan harmonisasi RTRW dan RPJMD sektor ekonomi dan sumber daya alam daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e) Koordinasi penyusun RPJD, RPJMD, dan RKPD bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan kontrak dengan DPRD di bidang RPJD, RPJMD, RKPD, ekonomi, dan sumber daya alam
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan persetujuan DPRD tentang APBD di bidang usaha dan sumber daya alam.
- h) Mengkoordinasikan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan ekonomi dan sumber daya aparatur
- i) Koordinasi pelaksanaan sinergi dan harmonisasi kegiatan pemerintah daerah provinsi dan kementerian/lembaga di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- j) Koordinasi perencanaan teknis dan pengembangan pangkat daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, perencanaan program, penganggaran, dan tugas terkait lainnya dibidang pemerintahan, sumber daya manusia dan sosial budaya.

Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan pembinaan. Ini juga mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana, program, dan anggaran urusan sosial, serta mendukung komunitas pedesaan, migrasi, budaya, perpustakaan, dan arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan

bertanggung jawab menghimpun informasi mengidentifikasi, menganalisis, dan menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan penyiapan rencana, program, dan anggaran bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kepedudukan, dan keluarga perencanaan, serta ketentraman dan ketertiban umum, ketenagakerjaan, kepegawaian, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan termasuk dalam sub bidang sumber daya manusia dan perencanaan pemerintahan.

Adapun fungsi Perencanaan Sosial Budaya, Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan sebagaimana dalam pasal 627 Perbub 31 tahun 2016 yaitu:

- a) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pertumbuhan daerah di bidang sosial budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan.
- b) Pelaksanaan verifikasi rancangan rencana strategis oleh perangkat daerah di bidang sosial budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan
- c) Mengkoordinasi penerapan musrembang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang sosial budaya, sumber daya manusia dan pemmerinthan.
- d) Mengkoordinasi pelaksanaan sinergi dan harmonisasi RTRW dan RPJMD daerah di bidang sosial budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan
- e) Mengkoordinasikan penyusunan RPJMD daerah di bidang sosial budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan.

- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan kontrak dengan DPRD di bidang pemerintahan, sosial budaya dan sumber daya manusia, dan RPJD, RPJMD, dan RKPD.
- g) Mengkoordinasikan DPRD dalam pelaksanaan kesempatan terkait APBD di bidang sosial budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan.
- h) Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, sosial budaya dan sumber daya manusia perangkat daerah dengan cara yang memaksimalkan efisiensi.
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergi dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga dan pemerintahan provinsi di bidang sosial budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan.
- j) Mengkoordinasikan perencanaan teknis pembangunan bagi aparatur pemerintah daerah, sosial budaya, dan sumber daya manusia.

4. Bidang Perencanaan Infastruktur dan Pengembangan wilayah

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang infastruktur dan pembangunan wilayah.

Sub Bidang Perencanaan Infastruktur bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, menganalisis dan menyiapkan bahan untuk perumusan dan juga pelaksanaan pembangunan. Badan ini juga mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang pekerjaan umum, serta tata ruang bidang komunikasi dan informatikan, statistik, dan pesandian,

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas menghimpun informasi, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyiapkan bahan

untuk perumusan dan pelaksanaan pembinaan. Badan ini juga harus mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran, serta mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang infrastruktur dan pembangunan perumahan, permukiman, dan transportasi, distrik dan pertahanan.

Adapun fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam pasal 631 Perbub 31 tahun 2016 yaitu:

- a) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah.
- b) Pelaksanaan perencanaan infrastruktur sektor dan rencana strategis pembangunan daerah untuk memperivikasi rencana perangkat daerah
- c) Mengkoordinasikan penerapan musrembang RPJPD, RPJMD, dan RKPD untuk pembangunan daerah dan perencanaan infrastruktur.
- d) Mengkoordinasikan biang perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah dalam rangka sinergi dan harmonisasi RTRW dan RPJMD daerah.
- e) Mengkoordinasikan rancangan RPJD, RPJMD, dan RKPD untuk pembangunan daerah dan perencanaan infrastruktur.
- f) Mengkoordinasikan penerapan kesepakatan dengan DPRD terkait bidang perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah, RPJD, RPJMD dan RKPD.
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan APBD, DPRD di bidng perencanaan infrastruktur dan pengembangan daerah.

- h) Mengkoordinasikan upaya sektor perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah untuk memaksimalkan sinergi dan koordinasinya.
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergi dan harmonisasi kegiatan pemerintah daerah provinsi dan kementerian/lembaga di bidang perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah.
- j) Di bidang perencanaan infrastruktur dan pembangunan wilayah, koordinasi teknis perencanaan pembangunan kepada aparaturnya.

5. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Melaksanakan tanggung jawab koordinasi dan pembuatan rencana, program, dan anggaran, pembinaan, penelaah dan pemberian laporan penyelenggara pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pembangunan daerah. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pembangunan daerah, melakukan kajian dan analisis, serta menyusun kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi). Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan model ekonomi dan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi makro daerah, koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan pembangunan dan pendanaan daerah, termasuk kebijakan keuangan daerah, koordinasi dan sinkronisasi pagu indikatif pembangunan daerah, pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan teritorial dan konektivitas

regional, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah serta sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.

Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan bertugas mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi. Selain itu juga dilakukan pendataan hasil pembanguann daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai baahn dokumentasi,

Adapun fungsi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

dalam pasal 635 Perbub 31 tahun 2016 yaitu:

- a) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan jenisnya sebagai sumber informasi untuk menyusun rencana pembangunan daerah.
- b) Menerapkan pendekatan integratif dan holistik untuk penilaian, analisis, dan pembuatan kerangka ekonomi makro regional.
- c) Koordinasi dansinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi makro, penganggaran, dan pengembangan model ekonomi di tingkat daerah
- d) Pelaksanaan analisis perencanaan, pendanaan pembangunan, dan sinkronisasi pembangunan daerah, termasuk kebijakan keuangan daerah
- e) Mengkoordinasi penerapan pagu indikasi untuk pembangunan daerah
- f) Pelaksanaan analisis, perumusan, dan konektivitas kebijakan daerah
- g) Pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan

pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas.

- h) Melaksanakan pengkajian, koordinasi, dan pembuatan RTRW daerah.
- i) Pelaksanaan kebijakan sektoral dan daerah yang dikoordinasikan untuk mengidentifikasi bidang-bidang prioritas di daerah.
- j) Aktualisasi tampilan informasi statistik pembangunan daerah sesuai kebutuhan.
- k) Implementasi pengaman data untuk bahan cetak dan elektronik yang digunakan sebagai dokumentasi hasil pembangunan daerah.
- l) Penggunaan survei untuk mengumpulkan data tentang pembangunan daerah dan melacak kemajuan.
- m) Pembuatan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala sebagai bahan penilaian.
- n) Melakukan survei secara berkala terhadap rencana pembangunan dan pelaksanaannya secara bulanan, triwulanan, semester demi semester, dan tahunan untuk memberikan informasi bagi program pembangunan daerah kedepan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Tanjung Jabung Timur

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman ini merupakan program sanitasi yang terintegrasi dari pusat ke daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non pemerintah di seluruh tingkatan. Pada tingkat kabupaten/kota pelaksanaan program pemutakhiran strategi sanitasi itu sendiri akan dikoordinasikan oleh kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten/kota, mulai dari perencanaan hingga implementasi pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman ini berada di bawah naungan Kementerian Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.⁴⁰

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman mencakup tiga parameter yaitu, Air Limbah Domestik, Pengelolaan Persampahan, Drainase. Untuk kasus Kecamatan Muara Sabak Timur program yang terlaksana hingga tahun 2022 hanya meliputi persampahan dan limbah, sedangkan pembuatan drainase belum terlaksana.

Peneliti mendapatkan hasil penelitian dari wawancara kepada bapak Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA, Elfranki Rusaldo, S. Kom mengatakan sebagai berikut:

⁴⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, *Strategi Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022-2026*, Tahun 2022

“Pemerintah sebagai aktor pembangunan, dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik dan akan dihadapkan pada berbagai masalah yang ada, baik masalah dari masyarakat maupun masalah dari alam. Sebagai peran dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah, maka kami mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan ini merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Adapun program yang dilaksanakan yaitu program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) yang dimana dilaksanakan di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Sabak Timur karena mengingat Kecamatan Sabak Timur merupakan daerah yang cukup berkembang dari daerah lain di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga sedang giat melakukan pembangunan dan tidak lepas dari dampak negatif yaitu sanitasi. Sanitasi ini pun kurang mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga pemerintah mengikuti program PPSP tersebut dan sistem kontrol dari program PPSP ini yaitu di Dinas PERKIM itu mengontrol pembangunan fisik, di Dinas DLH yaitu mejalankan dari program tersebut dan BAPPEDA sendiri mengontrol berhasil atau tidaknya dari program tersebut”⁴¹

Hasil wawancara diatas dalam melakukan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu mendukung rencana pembangunan karena kebijakan tersebut merupakan suatu alat bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mencapai tujuan-tujuan dari pembangunan. Dalam penerapannya tahapan-tahapan pelaksanaan dari progam percepatan pembangunan sanitasi pemukiman ini diantaranya yaitu:

- a. Kampanye, merupakan upaya komunikasi yang terorganisir untuk menyampaikan program kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk membangun serta memperkuat kemitraan terutama untuk keberlanjutan program.

⁴¹ Wawancara Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Elfranki Rusaldo, S. Kom, 4 Mei 2023.

- b. Edukasi, merupakan upaya peningkatan pengetahuan untuk perubahan perilaku yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, terutama optimalisasi akses sanitasi yang lebih.
- c. Advokasi, merupakan upaya komunikasi strategis, sistematis, dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendorong terjadinya perubahan kebijakan bertujuan untuk mendorong dan menciptakan komitmen politik dan sosial sebagai landasan kebijakan dan ketetapan anggaran.

Dari hasil wawancara diatas juga dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol dari program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman ini yaitu di Dinas Perumahan dan Permukiman itu mengontrol pembangunan fisik, di Dinas Lingkungan Hidup yaitu menjalankan dari program tersebut dan BAPPEDA sendiri mengontrol berhasil atau tidaknya dari program tersebut.

Tahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan kota secara menyeluruh sebagaimana dapat dilihat pada sistem pembangunan sanitasi pembangunan sanitasi dari sektor Pengeolaan Persampahan, Air Limbah Domestik, Drainase.

1. Pengelolaan Persampahan

Untuk sistem pelayanan persampahan, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru melayani masyarakat sekitar salah satunya yaitu Kecamatan Muara Sabak Timur. Perencanaan tahapan pengembangan persampahan mulai dari jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang yang terintegritas.

Jaringan persampahan yang telah menjadi Tempat Penampungan Akhir (TPA) sudah dilakukan penempatan dilokasi Kecamatan Muara Sabak Barat Kelurahan Parit Culum 1 dengan luas lebih kurang 12 Ha. Dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya telah dilakukan dengan pengangkutan sampah dari kota kelokasi tempat pembuangan sampah akhir dilakukan sebagian dengan menggunakan dump truck, amroll truck dengan kapasitas angkut 4 m³ dan sebagian lainnya dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil seperti motor sampah.

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibagi dalam tiga bagian yaitu, pengelolaan dari sumber sampah dengan TPS, pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA, dan pengelolaan sampah di TPA. Secara rinci tanggung jawab pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Sampah rumah tangga ke TPS Sampah/TPST menjadi tanggung jawab pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW.
- b. Sampah dari TPS Sampah/TPST ke TPA Sampah, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- c. Sampah kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai TPS Sampah/TPST dan atau TPA Sampah, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan atau dari TPS Sampah/TPST sampai ke TPA Sampah, menjadi tanggung jawab pemerintah.

Gambar 3

Sistem Sanitasi Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikatakan oleh bapak Alfajri selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mempunyai tugas pembinaan pengelolaan kebersihan jalan, trotoar dan fasilitas umum lainnya, sampah dan tinja serta Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tinja dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta proses penerbitan rekomendasi perizinan penanganan dan pengangkutan sampah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh pihak lainnya mengatakan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Sanitasi ini mencakup tiga parameter yaitu air limbah, persampahan dan drainase, untuk pelaksanaan pelayanan di bidang persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini baru melayani masyarakat di beberapa Kecamatan dek salah satunya yaitu Kecamatan Muara Sabak Timur, Muara Sabak Barat, Dendang, Kuala Jambi dan Geragai. Dalam rangka pengelolaan sampah sendiri telah dilakukan dengan pengangkutan sampah dari kota ke lokasi Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) dilakukan dengan menggunakan dumb truck, amroll truck dengan kapasitas angkut 4 m³ dan sebagian lainnya dengan menggunakan yang lebih kecil seperti motor sampah”⁴².

Tabel 3

Kemajuan Pelaksanaan SKK Untuk Persampahan

Strategi Sanitasi Kabupaten Thn 2013-2021			Kemajuan SKK			
Tujuan	Sasaran	Data dasar	2018	2019	2020	Status Saat ini (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan dalam sistem pengelolaan persampahan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan persampahan dari 8% menjadi 34% pada akhir tahun 2018 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R (reduce, reuse dan recycle) skala rumah tangga dari 0 % menjadi 2% pada tahun 2017.	1. Meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan persampahan dari 8% menjadi 34% pada akhir tahun 2018 2. Belum tersedianya sistem 3R di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1. Meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan persampahan dari 8% menjadi 9% 2. Belum tersedianya sistem 3R di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1. Meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan persampahan dari 9% menjadi 10% 2. Belum tersedianya sistem 3R di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1. Meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan persampahan dari 10% menjadi 12% 2. Belum tersedianya sistem 3R di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1. Meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan persampahan menjadi 12% 2. Belum tersedianya sistem 3R di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	3. Tersedianya Masterplan persampahan skala Kabupaten pada akhir tahun 2014.	3. Belum tersusunnya dokumen Masterplan persampahan Skala Kabupaten	3. Belum tersusunnya dokumen Masterplan persampahan Skala Kabupaten	3. Belum tersusunnya dokumen Masterplan persampahan Skala Kabupaten	3. Belum tersusunnya dokumen Masterplan persampahan Skala Kabupaten	3. Belum tersusunnya dokumen Masterplan persampahan Skala Kabupaten
	4. Tersedianya Perencanaan TPA yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kriteria TPA Pasang surut	4. Tersedianya Perencanaan TPA yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kriteria TPA Pasang surut	4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah memiliki TPA yang berada di Kelurahan Parit Culum 1	4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah memiliki TPA yang berada di Kelurahan Parit Culum 1	4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah memiliki TPA yang berada di Kelurahan Parit Culum 1	4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah memiliki TPA yang berada di Kelurahan Parit Culum 1

Kelembagaan Bidang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditangani oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup dan tugas pokok dari instansi terkait pengelolaan Persampahan. Pada saat ini peran aktif Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang juga di dukung oleh instansi terkait lainnya secara tidak langsung. Kondisi cakupan pelayanan Persampahan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih minim, dikarenakan

⁴² Wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Alfajri, 4 Mei 2023.

keterbatasan sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan bak sampah sesuai standar kesehatan.

Selanjutnya hasil wawancara mengenai sampah dengan masyarakat Kecamatan Muara Sabak Timur sebagai berikut:

“Menurut bapak Abdul sebagai salah satu masyarakat Kecamatan Muara Sabak Timur, disini kami membuang sampah di simpang 3 didekat pasar tradisional muara sabak timur dek, nanti ada truk sampah yang mengangkutnya, tapi kadang truck sampah tersebut tidak beroperasi yang menyebabkan sampah menumpuk dan berceceran di sekitaran lokasi pembuangan sampah”.⁴³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program dari percepatan pembangunan sanitasi pemukiman di bidang persampahan sudah dapat dikatakan sedang berlangsung, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala.

Begitupun dengan saudari “yuni” yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya kami selaku masyarakat disini sulit sekali kalau banyak sampah yang ada didepan rumah karena tidak ada pengangkut sampah yang masuk, maka dari itu sampah tersebut sering kami bakar dan dibuang ke sungai dek. Jadi menurut saya itu seharusnya ada pengangkutan sampah yang bisa masuk agar masyarakat disini tidak merasa kecewa”.⁴⁴

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sulit kalau banyak sampah yang menumpuk didepan rumah mereka karena sulit pengangkutan sampah yang masu, jadi diharapkan pemerintah agar bisa menyediakan pengangkutan sampah disetiap lingkungan bisa merata dan penyediaan tempat pembuangan sampah akhir agar sampah masyarakat tidak tercemar dimana-mana.

“Menurut Ibu Hj. Mila dalam pengelolaan sampah disini kami biasanya dikumpulkan terlebih dahulu selang beberapa hari baru dibakar, dan

⁴³ Wawancara Abdul Masyarakat, 7 Mei 2023

⁴⁴ Wawancara Yuni Masyarakat, 7 Mei 2023

karena juga dekat dengan sungai biasanya itu juga sering dibuang langsung dipinggiran sungai kalau air sungai sedang tinggi”.⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah padat rumah tangga di Kecamatan Muara Sabak Timur masih dilakukan secara individual skala rumah tangga, yang dilakukan dengan cara dikumpulkan disekitar pekarangan rumahnya dan pada waktu tertentu (sore hari atau selang beberapa hari) kemudian baru dibakar. Pada daerah aliran sungai sampah rumah tangga biasanya dibuang langsung dipinggiran aliran sungai, yang pada waktu tertentu ketika air sungai meninggi sampah akan terbawa arus/aliran sungai tersebut.

Adapun ide dari masyarakat dilingkungan pesisir yang mengemukakan bahwa:

“Menurut Bapak Sayuti seharusnya ada juga tempat pembuangan sampah akhir dan pengangkutan sampah yang bisa masuk di daerah pemukiman kami ini karena disini sulit sekali kalau tidak ada pengangkutan sampah karena sampah-sampah disini hanya bisa di bakar tapi itupun masih berbekas kalau hanya di bakar dan bahkan disini karena di daerah pesisir kami membuangnya disungai”⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bagian lingkungan pesisir juga sulit pengangkutan sampah masuk mengambil sampah masyarakat, sehingga masyarakat harus mengumpulkan sampah mereka dengan cara dibakar itupun masih berbekas dan membuang sampah di sungai. Dari sampah yang dibakar akan menjadi abu dan sehingga dapat tercemar dilingkungan lain.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa penanganan sampah di rumah masing-masing, tetapi pemilihan di tingkat rumah tangga belum ada partisipasi secara khusus. Sebagian besar masyarakat melakukan pemusnahan

⁴⁵ Wawancara Hj. Mila Masyarakat, 9 Mei 2023

⁴⁶ Wawancara Sayuti Masyarakat, 14 Mei 2023

sendiri dengan cara ditimbun atau dibakar, terutama pada pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Umumnya pada pengelolaan sampah sudah melibatkan perempuan misalnya membakar dan menimbun sampah baik tingkat rumah tangga sampai tingkat kelurahan dan kecamatan.

2. Air Limbah Domestik

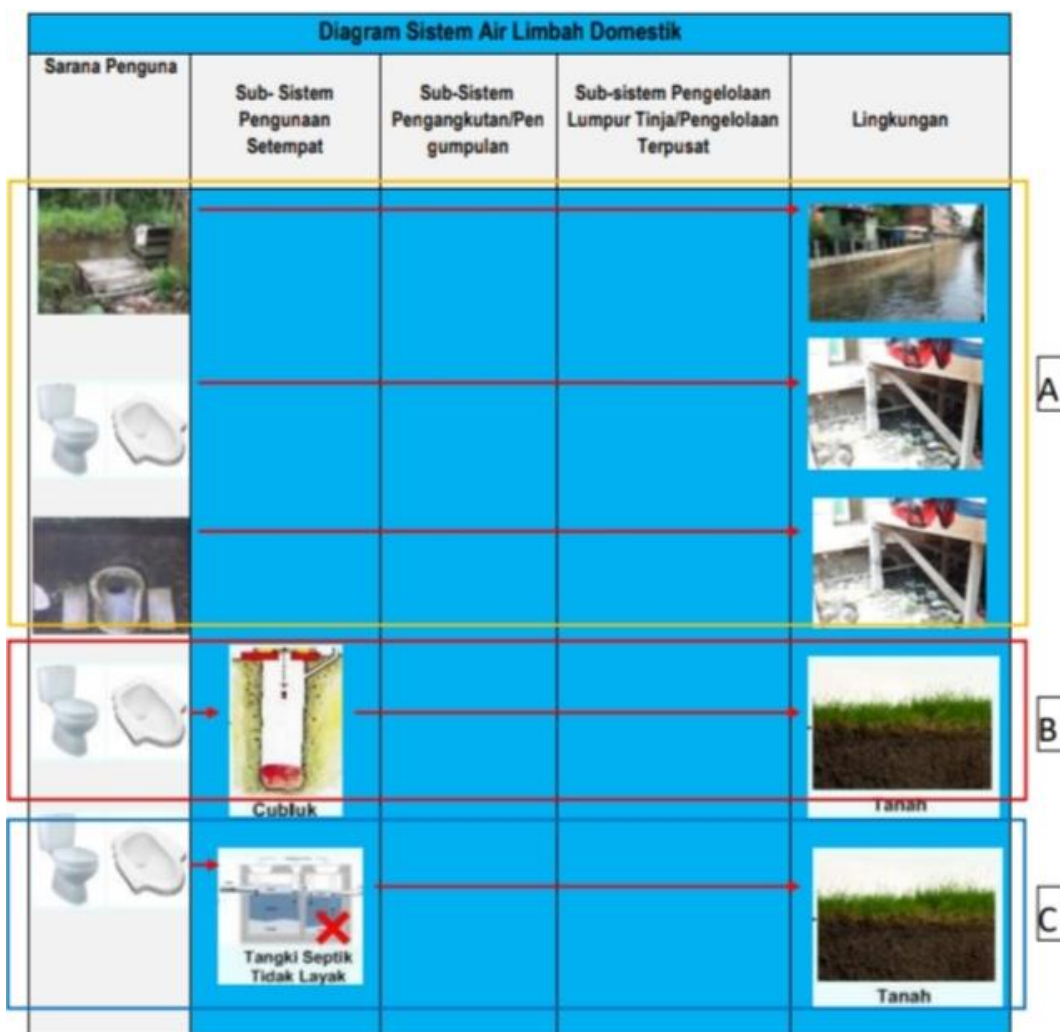
Sarana pengelolaan limbah khususnya limbah cair masih dilakukan dengan menggunakan jamban. Pemenuhan prasarana septic tank, pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, Instalasi Pengolahan limbah Terpadu (IPLT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki IPLT, baru proses pembangunan IPLT. Pada tahap awal pelaksanaan program Sanitasi Kabupaten telah merencanakan beberapa point penting dalam meningkatkan pelayanan dibidang persampahan seperti penyusunan dokumen perencanaan induk sistem pengelolaan air limbah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas layanan melalui penngkatan alokasi pembiayaan di bidang air limbah dan penyusunan qonum sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Point tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan disebabkan oleh beberapa faktor kendala, namun peningkatan sarana dan prasarana pelayanan air limbah telah dapat ditingkatkan.

Fasilitas publik instalasi pengelolaan limbah merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah khususnya untuk penampungan pengelolaan akhir limbah dikawasan perkotaan. Sampai saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum maksimal dalam pengolahan limbah baik itu limbah domestik maupun limbah

medis pada pusat-pusat pelayanan masyarakat belum tertata dengan baik. Data pokok Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021, cakupan kepemilikan jamban keluarga pada saat ini adalah 34.8% baru menjangkau sebanyak 18.335 KK dari 52.761 KK dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan baru 7.8 %.

Gambar 4

Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 4

Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik

Strategi Sanitasi Kabupaten Thn 2013-2021			Kemajuan SSK			
Tujuan	Sasaran	Urut dasar (Tahun 2013)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Status Saat Ini Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengaliran air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan	1. Menurunkan angka BABS dari 42% menjadi 40% 2. Tersedianya perencanaan pengaliran air limbah domestik dan industri rumah tangga skala perKabupaten pada akhir tahun 2018 3. Meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 24% menjadi 30% pada akhir tahun 2018. 4. Tersedianya dan berfungsinya IPAL Komunal untuk industri rumah tangga dari 0 unit menjadi 2 unit pada akhir tahun 2012/5	1. BABS masih di angka 42% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2. Belum tersusunnya dokumen perencanaan Masterplan Air Limbah Domestik 3. Sarana dan prasarana pengaliran air limbah Domestik tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai tingkat layanan menjadi 20% dan masyarakat tidak melakukan BABS 4. Belum terbangunnya IPAL Komunal Untuk industri rumah tangga	1. BABS pada tahun 2014 menurun 3% dan masyarakat yang masih melakukan BABS 39% 2. Belum tersusunnya dokumen perencanaan Masterplan Air Limbah Domestik 3. Pencapaian Akses Layak sebesar 27,52% 4. Belum terbangunnya IPAL Komunal Untuk industri rumah tangga	1. BABS pada tahun 2019 menurun 2% dan masyarakat yang masih melakukan BABS 37% 2. Belum tersusunnya dokumen perencanaan Masterplan Air Limbah Domestik 3. Pencapaian Akses Layak sebesar 32,44% 4. Belum terbangunnya IPAL Komunal Untuk industri rumah tangga	1. pada tahun 2020 masyarakat Tanjung Jabung Timur masih melakukan BABS sebanyak 35,2% 2. Belum tersusunnya dokumen perencanaan Masterplan Air Limbah Domestik 3. Pencapaian Akses Layak sebesar 36,96% 4. Terbangunnya 4 IPAL Komunal di 4 pasar daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	1. pada tahun 2021 masyarakat Tanjung Jabung Timur masih melakukan BABS sebanyak 34,8% 2. Belum tersusunnya dokumen perencanaan Masterplan Air Limbah Domestik 3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan data dan STBM dan Ehrs tingkat layanan Akses Air Limbah Domestik sudah mencapai 65,2% dan masyarakat tidak BABS (akses dasar) 4. Terbangunnya 4 IPAL Komunal di 4 pasar daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hasil wawancara mengenai air limbah dengan masyarakat Kecamatan Muara Sabak Timur:

“Menurut ibu Ririn sebagai masyarakat Kecamatan Muara Sabak timur mengatakan bahwa disini kami membuang air limbah hasil mencuci baju, mencuci piring dan mandi itu di sekitar lahan atau parit yang didekat rumah.”⁴⁷

Begitupun dengan bapak Harum mengatakan bahwa:

“Disini kami membuang air limbah itu disalurkan ke sungai dek karena rumah kami ini belakangnya sungai jadi di salurkan ke sungai”⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa limbah cair rumah tangga hasil pencucian dan mandi di Kecamatan Muara Sabak Timur di gelontorkan begitu saja disekitar rumah, dan rumah tangga yang selalu memanfaatkan lahan maupun parit yang ada di sekitaran pekarangan untuk

⁴⁷ Wawancara Ririn Masyarakat, 14 Mei 2023

⁴⁸ Wawancara Harum Masyarakat, 15 Mei 2023

membuang limbah cairnya tanpa memperhatikan dampaknya bagi kesehatan. Dan begitu juga dengan penduduk yang tinggal di sekitaran sungai pembuangan limbah cair rumah tangganya langsung disalurkan ke sungai.

Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas menempati posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari berbagai pihak. Disadari juga bahwa pembangunan sanitasi seringkali mengabaikan kepentingan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian juga dengan aspek kesetaraan gender. Dengan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan mereka, menentukan prioritas, memobilisasi sumberdaya, memobilisasi kontribusi, bernegosiasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh masyarakat itu sendiri.
- b. Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair dilingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan.

Secara keseluruhan, peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengelolaan air limbah

belum maksimal, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari Pemerintah, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya.

3. Drainase

Dokumen Perencanaan Induk Sistem Drainase Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dilaksanakan, dan jaringan drainase wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menyesuaikan dengan kondisi garis kontur kemiringan dan ketinggian, sehingga setiap saluran yang telah dibangun mengakibatkan luapan dan kurang daya tampung debit air sewaktu musim penghujan datang dan juga disaat meluapnya aliran sungai di sebagian daerah pinggir sungai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada setiap 1 tahun sekali. Kondisi ini harus ditanggulangi agar kondisi yang tidak diinginkan terjadi dapat di tanggulangi secara baik, sehingga masyarakat juga harus memberikan sikap dengan perilaku yang sehat terutama intuk meninggalkan kebiasaan membuang sampah kesungai dan saluran drainase.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di kantor Di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikatakan oleh bapak Dessy Fitriani, S.E selaku Kassubid Perencanaan Pembangunan wilayah mengatakan sebagai berikut:

“Pada umumnya limbah cair rumah tangga hasil pencucian dan mandi di Kabupaten Tanjung Jabung timur ini di lontarkan begitu saja disekitar rumah. Rumah tangga yang ada selalu memanfaatkan lahan maupun parit yang ada disekitaran pekarangan. Dan pada wilayah penduduk yang tinggal di sekitar sungai, pembuangan limbah cair rumah tangga umumnya langsung disalurkan kesungai atau anak-anak sungai sehingga dapat menimbulkan pendangkalan pada parit atau sungai itu sendiri”.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara Kassubid Perencanaan Pembangunan Wilayah, Dessy Fitriani, S.E, 4 Mei 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa limbah cair rumah tangga hasil pencucian dan mandi di Kabupaten Tanjung Jabung timur ini di lontarkan begitu saja disekitar rumah. Rumah tangga yang ada selalu memanfaatkan lahan maupun parit yang ada disekitaran pekarangan untuk membuang limbah cairnya tanpa memperhatikan dan melihat dampak dari limbah tersebut terhadap kesehatan dan kebersihan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan pada wilayah penduduk yang tinggal di sekitar sungai, pembuangan limbah cair rumah tanggya umumnya langsung disalurkan kesungai atau anak-anak sungai sehingga dapat menimbulkan pendangkalan pada parit atau sungai itu sendiri. Hanya sebagian kecil masyarakat yang sudah membuat kolam atau lobang resapan sederhana disekitar pekarangannya guna menampung hasil limbah cair dari rumah tangganya. Dapat dikatakan bahwa penanganan air limbah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih menggunakan sistem pengelolaan setempat. Sangat besar peluang yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah karena hampir semua penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan limbah tanah, baik sumur maupun sumur terbuka.

B. Kendala-Kendala Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tidak akan terlepas dari suatu risiko kegagalan yang diakibatkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman, diantaranya yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Pengelolaan Persampahan

Adapun permasalahan mendesak persampahan yaitu:

- a) Aspek Teknis: permasalahan yang ada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya untuk persampahan belum adanya, sistem pengangkutan sampah yang merata disetiap Kecamatan, dan minimnya bak-bak sampah yang ada, sampah tidak terproses sepenuhnya, kurangnya sarana dan prasarana persampahan, belum memiliki masterplan persampahan, kurangnya kesadaran masyarakat.
- b) Aspek Non Teknis: belum optimalnya pelaksanaan peraturan persampahan yang ada, belum terbentuknya UPTD persampahan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembuangan sampah pada lokasi yang disediakan seperti bak sampah.

2. Air Limbah

Adapun permasalahan mendesak Air Limbah Domestik yaitu:

- a) Aspek Teknis: permasalahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya air limbah, belum adanya sistem penyedotan tinja, septik tank tidak kedap yang dimiliki oleh masyarakat, tidak ada truk tinja, angka BABS masih tinggi, belum memiliki masterplan air limbah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal.
- b) Aspek Non Teknis: kecilnya pendanaan dari pemerintah untuk sektor sanitasi khususna air limbah, belum terbentuknya peraturan daerah mengenai pengelolaan untuk air limba, belum optimalnya kinerja lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengelolaan air limbah, tidak adanya peran swasta dan kurangnya peran dari masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pengelolaan air limbah.

3. Drainase

Permasalahan mendesak Drainase pemukiman yaitu:

- a) Aspek Teknis: permasalahan yang ada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya untuk Drainase permukiman adalah, belum adanya masterplan drainase pemukiman, daerah berada di dataran, tepi sungai dan rawan genangan, kurangnya sarana dan prasarana drainase perkotaan, perlunya pembangunan drainase pemukiman di daerah perkotaan terlebih dahulu.
- b) Aspek Non Teknis: belum optimalnya pembangunan drainase pemukiman, pembangunan sistem drainase pemukiman Tanjung Jabung Timur belum tersentu.

Adapun permasalahan umum dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yaitu:

- a. Kesadaran Masyarakat yang Masih Kurang

Kesadaran masyarakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kecamatan Muara Sabak Timur. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam bidang persampahan ini juga dijelaskan oleh bapak Alfajri yang mengatakan bahwa:

“Yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah dilingkungannya seperti membuang sampah langsung kesungai.”⁵⁰

Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Tanjung jabung Timur masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Ini disebabkan belum adanya TPA yang control landfill ataupun sanitary lanfill, maupun pengangkutan yang belum maksimal karena jarak satu wilayah dengan wilayah lainnya yang sangat jauh.

b. Keterbatasan Anggaran Dana

Semua kegiatan tidak luput dari dukungan dana, dukungan dana sangat mempengaruhi kelancaran sebuah program pemerintah. Disamping dana yang dialokasikan APBD untuk sanitasitidak terlalu besar, ada hal-hal yang memang memiliki kepentingan yang menjadi prioritas pemerintah yang harus didahulukan dan kepentingan tersebut juga memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, seperti jalan yang bolong akan lebih didahulukan karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, juga dijelaskan oleh Bapak Mustam, S.E selaku Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA mengatakan bahwa:

“Dalam bidang persampahan keterbatasan anggaran juga menjadi suatu kendala yaitu dalam pengangkutan sampah yang belum maksimal karena jarak wilayah satu dengan wilayah lainnya yang sangat jauh dan membutuhkan biaya operasional yang tinggi.”⁵¹

b. Kemampuan Aparatur Pemerintah yang Masih Kurang

Kemampuan Aparatur Pemerintah seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, sehingga kemampuan aparatur

⁵⁰ Wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Alfajri, 4 Mei 2023.

⁵¹ Wawancara Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA, Mustam, S.E, 4 Mei 2023.



pemerintahnya perlu ditingkatkan. Kelemahan pemerintah dalam SDM yaitu menerima semua latar belakang pendidikan dengan penempatan bidang kerja yang tidak sesuai. Hal tersebut membuat aparatur kita menjadi kurang profesional dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dikarenakan tidak ahli dalam bidangnya.

C. Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut teori David Krech efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberkan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat tercapainya tujuan dari aktifitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵² Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.⁵³ Peneliti mendapatkan hasil dari wawancara kepada bapak Dessy Fitriani S.E Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah BAPPEDA mengatakan sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di kabupaten tanjung jabung timur ini khusus pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah itu di Dinas Lingkungan Hidup, untuk darinase sendiri itu di Dinas Perumahan dan Permukiman

⁵² M. Alie Humedi dkk., *Etnografi Bencana Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta:PT LkiS Printing Cemerlang, 2016), hlm. 43

⁵³ Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini sendiri mengontrol berhasil atau tidaknya program tersebut.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adapun tujuan dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurunn waktu 2021-2026.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan Berkelanjutan.

1. Pengelolaan Persampahan

Pada tahap awal pelaksanaan program Sanitasi Kabupaten telah merencanakan beberapa point penting dalam meningkatkan pelayanan di bidang persampahan seperti penyusunan dokumen perencanaan induk sistem pelayanan persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan alokasi pembiayaan di bidang persampahan dan penyusunan sistem pelayanan persampahan di kabupaten, point tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan disebabkan oleh beberapa faktor kendala, namun peningkatan sarana dan prasarana pelayanan persampahan telah dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Alfajri ST, ME selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mengatakan sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan sampah telah dilakukan dengan pengangkutan sampah dari kota ke lokasi Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) dilakukan dengan menggunakan dumb truck, amroll truck dengan kapasitas angkut 4 m³ dan sebagian lainnya dengan menggunakan yang lebih kecil seperti motor sampah, dan juga kami dari pihak DLH ini sudah menyediakan tempat pembuangan sampah di beberapa titik, tetapi sampah masih ada juga yang berserakan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat.”⁵⁴

Hasil dari data penelitian yang didapatkan diatas mengatakan bahwa untuk pelaksanaan pelayanan di bidang persampahan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tajung Jabung Timur saat ini masih minim. Adapaun tahapannya yaitu mulai dari jangka pendek, jangka menengah sampai

⁵⁴ Wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Alfajri, ST. ME, 4 Mei 2023.

jangka panjang. Point pentingnya dalam meningkatkan pelayanan di bidang persampahan seperti menyusun dokumen perencanaan induk sistem pelayanan persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meningkatkan sarana dan prasarana, dan peningkatan kualitas melalui peningkatan alokasi pembiayaan dan persampahan.

2. Pengelolaan Limbah

Secara umum saluran pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadi masalah, dimana sebagian besar masyarakat tidak memiliki fasilitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat. Fasilitas publik instalasi pengelolaan limbah merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah khususnya untuk penampungan pengelolaan akhir limbah dikawasan perkotaan. Sampai saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum maksimal dalam pengolahan limbah baik itu limbah domestik maupun limbah medis pada pusat-pusat pelayanan masyarakat belum tertata dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikatakan oleh bapak Alfajri selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengatakan:

“Untuk Air Limbah Domestik, sarana pengelolaan limbah khususnya limbah cair ini masih dikakukan dengan menggunakan jamban. Pemenuhan prsarana septick tank, pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) Kabupaten tanjung Jabung Timur belum memiliki IPLT baru proses pembangunan IPLT. Salah satu contohnya itu sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat. Dan banyak hal yang harus dipersiapkan dan

direncanakan dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, tetapi sebagai tahap awal kami akan prioritaskan untuk di wilayah permukiman sehingga dapat dijadikan master plan untuk pengembangan sistem pengelolaan air limbah di kawasan lain di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah, umumnya masyarakat sudah memiliki jamban pribadi dengan sistem pengelolaan awal/setempat menggunakan septik tank dan selebihnya menggunakan non septick tank termasuk jamban dengan sistem cubluk. Belum ada sistem pengumpulan tinja dari masyarakat. Sejauh ini tinja masyarakat berakhir di septick tank dan sungai. Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki armada sedot tinja serta IPAL yang baru dibangun pada tahun 2017 sampai saat ini di tahun 2022 kondisi IPAL belum terpakai. dan di Kabupaten tanjung Jabung Timur masih proses pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) dan juga masih banyak yang harus dipersiapkan dan direncanakan dalam pengelolaan air limbah. untuk tahap awal pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memprioritaskan diwilayah permukiman sehingga dapat dijadikan master plan untuk pengembangan sistem pengelolaan air limbah di kawasan lain di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salah satu contoh sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat, yang mengakibatkan masyarakat melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang merupakan perilaku tidak sehat. Dapat dikatakan bahwa Air Limbah Domestik Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini belum

⁵⁵ Wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Alfajri, 4 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

maksimal dalam pengelolaan air limbah baik itu limbah domestik maupun limbah medis pada pusat-pusat pelayanan masyarakat belum tertata dengan baik.

3. Pengelolaan Drainase

Kondisi drainase khususnya dilingkungan perumahan dan permukiman di beberapa kawasan masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan. Hal ini ditandai dengan adanya genangan di beberapa kawasan pada musim hujan. Permasalahan genangan secara umum disebabkan oleh belum memadainya fasilitas saluran drainase, sementara saluran yang tidak ada tidak semuanya berfungsi, dikarenakan perilaku buang sampah sembarangan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikatakan oleh bapak Zahri selaku Staff Sanitasi mengatakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan layanan drainase lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memadai. Dan kondisi drainase khususnya di lingkungan perumahan dan permukiman di beberapa kawasan, salah satunya Kecamatan Muara Sabak Timur saat ini masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan. Ditandai dengan adanya genangan di beberapa kawasan pada musim hujan. Dan saat ini pemerintah Tanjung Jabung Timur belum ada membangun drainase di kawasan permukiman penduduk karena kontur pada kawasan pesisir tidak memungkinkan pembangunan drainase permukiman. Dan pemerintah akan mengupayakan pembangunan serentak baik itu dari segi infrastruktur, air bersih, drainase, persampahan dan air limbah.”⁵⁶

Hasil dari data penelitian yang didapatkan di atas mengatakan bahwa Pelaksanaan layanan drainase lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memadai. Akan tetapi pemerintah akan mengupayakan pembangunan serentak baik itu dari segi infrastruktur, air bersih, drainase, persampahan dan air

⁵⁶ Wawancara Staff Sanitasi, Zahri, 4 Mei 2023

limbah, mengingat Kabupaten masih tahap pengembangan pembangunan atau pemekaran dan pengelolaan drainase juga didukung oleh pihak swasta melalui Program tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan penjelasan ringkasan wawancara dari informan di atas, dan sesuai dengan indikator Efektivitas menurut David Krech, penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya efektivitas pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ini belum Efektiv dilihat dari bidang persampahan, bidang air limbah dan bidang drainase, walaupun pemerintah sudah melakukan upaya kampanye, edukasi dan advokasi. Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 yaitu dalam segi pelaksanaan program belum maksimal hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yaitu, kesadaran masyarakat yang masih kurang, keterbatasan anggaran dana, kemampuan aparatur pemerintah yang masih kurang, dan terdapat beberapa permasalahan mendesak di bidang persampahan, bidang air limbah dan bidang drainase. Akan tetapi pemerintah mengupayakan untuk pembangunan serentak mengingat Kabupaten masi tahap pengembangan atau pemekaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektivitas Pelaksanaan Percepatan Pembngunan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman ini merupakan program sanitasi yang terintegrasi dari pusat ke daerah, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non pemerintah di seluruh tingkatan. Pelaksanaan program pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten/kota itu sendiri yang akan dikoordinasikan oleh kelompok kerja perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten/kota, mulai dari perencanaan hingga implementasi pembangunan dan pengelolaan sanitasi.
2. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di kabupaten tanjung jabung timur yaitu, kesadaran masyarakat yang masih kurang, keterbatasan anggaran dana, kemampuan aparatur pemerintah yang masih kurang, dan terdapat beberapa permasalahan mendesak di bidang persampahan, bidang air limbah dan bidang drainase.
3. Terkait efektivitas pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sesuai dengan indikator Efektivitas menurut David Krech, yaitu dalam segi pelaksanaan program belum Efektiv hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada pengelolaan limbah dan drainase, akan tetapi pemerintah mengupayakan untuk

pembangunan serentak mengingat Kabupaten masi tahap pengembangan atau pemekaran.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman ini agar berjalan dengan baik yaitu dengan konsistensi dalam pembangunan sanitasi karena konsistensi adalah kunci keberhasilan dalam pembangunan.

Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Tidak hanya dengan sosialisasi, tapi masyarakat juga perlu diberikan pendekatan keagamaan. Anggaran dana tidak bisa mengandalkan mendapat dari anggaran APBD, namun juga perlu pengajuan dana hibah dari luar yang sudah bekerjasama dengan Indonesia dalam bidang sanitsi, dan meminta bantuan dari CSR swasta yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perlu adanya reformasi birokrasi dalam SDM yang ada di pemerintahan, agar mendapatkan aparatur yang berkualitas dalam menjalankan kebutuhan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menempatkan aparatur sesuai dengan latarbelakang pendidikannya agar pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Alexander Anggono, “*Akuntansi Manajemen Pada Entensitas Publik*”, Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabta, 2008
- Amsal, *Masalah Permukiman Perkotaan Di Indonesia Dan Kebijakan Penanggulangannya*, Jakarta: Indocam, 2018
- Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Edi Setiadi Soedjono, dkk., *Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi*, Jakarta: Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010.
- Farid Wajdi dan Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Gerston, L, N, *Public Policy Making in A Democratic Society: A Guide to CIVIC Engaagement*, New York: M.E Sharp, Inc, 1992
- H. Aras Solong dan Asriadi, *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Indrawijaya dan Adam Ibrahim, *Konsep Prilaku, dan Budaya Organisasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaun Persada Tahun 2009.
- Kecamatan Muara Sabak Timur Dalam Angka 2022
- M. Alie Humaedi, dkk., *Etnografi Bencana Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Bencana*, Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2016.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Matthew Miles, dkk., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Umum, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Muhaimin, dkk., *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhrial Akbar dan Widya Kurniati Mohi, *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.
- Pasolong dan Harbani, *Konsep Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Pokja (ed.), *Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, 2013.
- Profil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2022
- Ravyansah, dkk., *Kebijakan Publik*, Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026
- Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, Medan: Publishing, 2017.
- Siagin, *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020
- Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Alfabeta, 2007
- William Djani, *Kebijakan Publik (dan Implikasinya di era Otonomi Daerah)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Lain-Lain

- Abdullah Ramadhani dan Muhamad Ali Ramadhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, *Jurnal Publik*, Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Agung Pri Aji, *“Kajian Karakteristik Pemukiman”*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Puwokerto, 2018.
- Andi Sriwahyuni, *“Hubungan Sanitasi Lingkungan Rumah Dan Personal Hygiene”*, Skripsi Universitas HasanuddinMakassar, 2019.
- “Bappenas Optimalkan DAK Dana Desa,” <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/kejar-target-100-persen-akses-air-minum-dan-sanitasi-layak-di-2019-bappenas-optimalkan-dak-dana-desa/>, diakses pada Oktober 2022.
- Dahlan Abdullah, Perancangan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Pada Kantor Bupati, *Jurnal Teknik Informatika*, Tahun 2019.
- David Silaen, *“Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Sukoharjo”*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.
- Diyan mailita Sari, *“Analisis Pelaksanaan Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) di Kota Depok”*, Skripsi Universitas Indonesia, 2015
- Gede Agus Depantara, dkk., *“Tinjauan Keadaan Fasilitas Sanitasi obyek Wisata Pura Tirta Sumadala Kelurahan Bebalang”*, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Tahun 2019.
- Gary Jonathan Mingkid, dkk., *“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan,”* *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Tahun 2017.
- Kartika Puspa Dewi, dkk., *“Penentuan Kualitas Pemukiman Berdasarkan Kriteria Eco-Settlement”*, *Jurnal Spasial* Tahun 2019
- Mudasir, *“Desain Pembelajaran”*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Indragiri Hulu 2012.
- Muhammad Debby Rizani, dkk., *“Perdampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pada Masa Pandemi Covid-19”*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Muttofi'ah, "Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Nining Martiningtyas, "Implementasi Model Kirkpatrick Dalam Evaluasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kota Dalam Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi," *Jurnal Komunikasi Ekonomi dan Manajemen*, Tahun 2020.
- Nur Samsu Hadi, "*Hubungan Antara Higiene Sanitasi Dengan Keberadaan Angka Kuman*", Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun, 2019.
- Normawati Kristin Situmorang, "*Sanitasi Dasar Pemukiman Pesisir di Lingkungan*", Skripsi Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, 2021.
- "Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman," <https://baper.litbang.kendalkab.go.id/program-percepatan-pembangunan-sanitasi-permukiman-ppsp/>, diakses pada 3 November 2012.
- Ratih Anggraeni, dkk., "Evaluasi Kebijakan Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, Tahun 2018.
- Samugyo Ibnu Raedjo, "*Strategi dan Aksi Percepatan Pembangunan Daerah*", Skripsi Universitas Komputer Indonesia, 2021.
- Sitti Faizah, "*Identifikasi Pembangunan Infastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah Pedesaan*", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Siti Fuadillah, "*Upaya Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Privat Pada Kawasan Pemukiman Kota Makassar*", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013
- Sri Dewi Monica, "Konsep Kebijakan Publik", *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Tahun 2021.
- Supriadi, "Penerapan Hiygiene Dan Sanitasi Di Pondok Pesantren As'ad Seberang Kota Jambi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Tahun 2018.
- Yudhi Lestanata, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, Tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



Zulhamida Putri Harahap, “*Gambaran Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Penyakit Skabies Pada Penghuni Lapas Klas IIB*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2316 /D.II.1/PP.00.11/4/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 03 April 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Badan Perencanaan, Penelitian
Dan Pengembangan Kabupaten Tanjabtim
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Radiatul Asrina**
NIM : 105190061
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.**

Lokasi Penelitian : Dinas Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Kab. Tanjabtim
Waktu Penelitian : 03 April 2023 – 03 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Ani Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Elfranki Rusaldo, S. Kom	Kassubid Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2.	Alfajri ST, ME	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3.	Zahri, S. Ip	Staff Sanitasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4.	Dessy Fitriani, S.E	Kassubid Pembangunan Wilayah BAPPEDA, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5.	Abdullah	Masyarakat
6.	Yuni	Mahasiswa
7.	Hj. Mila	Masyarakat/ pedagang kaki lima
8.	Sayuti	Masyarkat
9.	Ririn	Masyarakat
10.	Harun	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Instrumen Wawancara

No	Bentuk Pertanyaan
1.	Bagaimana mekanisme program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2.	Seperti apa sistem kontrol pada program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3.	Bagaimana menurut bapak apakah program tersebut sudah berjalan dengan optimal?
4.	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
5.	Apa saja program yang berjalan sekarang?
6.	Bagaimana kondisi sebelum adanya program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
7.	Bagaimana upaya dalam mengurangi area beresiko pada pendangkalan saluran di kecamatan muara sabak timur?
8.	Instansi apa yang bertanggung jawab pada program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
9.	Bagaimanakah pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat tentang pembangunan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
10.	Apakah dalam menjalankan program tersebut instansi berkolaborasi dengan instansi lain?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Kassubid Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kassubid Perencanaan Sosial dan Budaya BAPEDA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





Gambar 6
Wawancara dengan Staff Sanitasi, Dinas Perumahan dan Permukiman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Gambar 7
Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 8
Wawancara dengan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Radiatul Asrina

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tgl Lahir : KA Patah Parang, 20 Juni 2001

NIM : 105190061

Alamat Asal : Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Alamat Sekarang : Jl. Pathin 2, No. 96 Perumnas Bumi Palmerah Indah
Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Palmerah

No. Telp/ HP : 082250389733

Nama Ayah : Abdul Azis

Nama Ibu : Ratna

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, tahun lulus : SDN 13/x Simbur Naik, 2013

SMP/MTS, tahun lulus : MTs Bustanul Ulum Simbur, 2016

SMA/MA, tahun lulus : Mas Bustanul Ulum Simbur Naik, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi